

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang melanda dunia, turut mempengaruhi Indonesia, terutama dibidang pendidikan, akibat semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi akan menyebabkan kehidupan manusia lebih dinamis dan penuh tantangan, sehingga diperlukan manusia yang mempunyai kemampuan untuk dapat mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada lingkungannya, berdasarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang dimiliki. Dengan kata lain kunci untuk menghadapi era globalisasi tersebut adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penataan sistem pendidikan yang ada.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan kebijaksanaan pendidikan nasional yang mengacu kepada UUD 1945 dan GBHN. Dalam Bab II pasal 4 dijelaskan bahwa:

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Makna yang terkandung dalam tujuan pendidikan ini adalah ingin mewujudkan sumber daya manusia yang

berkualitas. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, adalah suatu investasi yang berkontribusi terhadap produktivitas di sektor pendidikan dan sektor lainnya. Karena setiap warga negara diharapkan dapat berperan dan turut secara aktif menentukan dan memanfaatkan keberhasilan pembangunan.

Salah satu wadah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah "*pendidikan*" (Sayidiman Suryohadiprojo, 1991). Proses kerja dan pencapaian tujuan pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas Sumber Daya Manusia yang mengelola kegiatan pembangunan itu dan kapasitas mereka mengapresiasi hasil (Tinatoro, 1993). Beranjak dari premis bahwa wahana pengembangan Sumber Daya Manusia adalah pendidikan, maka pendidikan itu harus mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia dengan dua kemampuan sekaligus. *Pertama*, kemampuan melahirkan manusia yang dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan nasional. *Kedua*, kemampuan untuk menghasilkan manusia yang dapat mengapresiasi, menikmati, dan memelihara hasil-hasil pembangunan itu, yang ternyata lebih sulit dari pada membangun itu sendiri.

Memang diakui bahwa banyak faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan seperti dana, sarana dan prasarana, sumber daya alam dan sebagainya. Salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan pembangunan adalah

sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Seperti yang dikemukakan Hasan Walinono (1991:12):

Karena manusia merupakan kekuatan utama pembangunan maka dengan demikian sistem dan mutu pendidikan akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan. Hanya dengan sistem dan mutu pendidikan yang baik dapat ditingkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat.

Dari kutipan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa manusia merupakan kekuatan utama pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan manusia-manusia yang berkualitas. Penyediaan manusia yang berkualitas tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan. Dalam pengertian yang lebih luas pendidikan mencakup pendidikan itu sendiri, pengajaran dan latihan yaitu meningkatkan keterampilan. Jadi manusia yang berkualitas mempunyai ilmu pengetahuan, menguasai ketrampilan dan memiliki sikap yang baik.

Dengan kriteria manusia Indonesia seutuhnya yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 2. Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, dapat diyakini bahwa usaha pembangunan dalam mewujudkan kondisi tinggal landas dapat terlaksana.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, pemerintah telah melaksanakan suatu sistem pendidikan nasional, yaitu satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Dilihat dari jenjang pendidikan, sistem pendidikan nasional terdiri dari sub sistem pendidikan: pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Keempat sub sistem pendidikan tersebut saling melengkapi dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan dasar sebagai sub sistem pendidikan nasional dituntut untuk ikut merealisasikan pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut. Pendidikan Dasar diharapkan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas tinggi untuk mengisi kegiatan pembangunan. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar menyatakan bahwa "Pendidikan dasar" bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik dalam rangka mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti "pendidikan menengah". Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pendidikan dasar menyajikan program pendidikan enam tahun di Sekolah Dasar (SD) dan program pendidikan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Pendidikan Dasar di SD yang lamanya 6 tahun bertujuan untuk membimbing, mengajar dan melatih peserta didik selaras dengan tingkat perkembangannya pengetahuan, sikap dan keterampilan serta daya cipta yang

diperlukan untuk hidup di lingkungan masyarakat dan selanjutnya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Achmad Sanusi, 1993 : 80).

Dilihat dari tujuan institusional, lembaga pendidikan merupakan wahana pengembangan sumber daya manusia (SDM), di mana keluarannya dipersiapkan untuk bekerja pada pelbagai sektor pembangunan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, tidak terkecuali sekolah dasar (SD).

Sekolah Dasar (SD) merupakan jenjang pertama dari satuan jenjang pendidikan dasar (Dikdas), yang meletakkan dasar dari dua kemampuan sebagaimana telah disebutkan di atas tadi. Lebih khusus lagi tujuan Sekolah Dasar merupakan bagian integral dari tujuan pendidikan dasar (Dikdas).

Sebagai jenjang pertama dari satuan pendidikan dasar, secara institusional Sekolah Dasar (SD) bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar dalam bidang "*Baca-Tulis-Hitung*", pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di SLTP (Depdikbud, 1993). Untuk mencapai tujuan itu, maka peningkatan kualitas proses dan mutu lulusan Sekolah Dasar (SD) pada umumnya harus menjadi perhatian utama tenaga kependidikan dan khususnya tenaga yang bergerak dibidang proses belajar mengajar.

Dari sekian banyak faktor yang terkait untuk berlanjutnya suatu pendidikan dasar khususnya SD, faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting. Hal ini dikarenakan manusialah yang mengelola faktor-faktor lainnya. Betapapun sempurnanya kurikulum, lengkapnya perpustakaan dan permanennya gedung belajar, serta menunjangnya faktor lain, tanpa dikelola oleh manusia-manusia yang berkualitas, tentulah tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Adapun unsur manusia di Sekolah Dasar tersebut diantaranya: Kepala Dinas P dan K dan para staf yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sekolah Dasar, penilik, kepala sekolah dan tenaga pengajar atau guru. Guru merupakan salah satu sumber daya manusia yang mempunyai peranan yang dominan dalam pendidikan dan pengajaran, khususnya proses belajar di sekolah dasar. Hal ini dikarenakan guru terlibat langsung dalam berintegrasi dengan murid. Sehubungan dengan itu Elisa Lexi Kalumata (1988) dalam tesisnya, "Meskipun keberhasilan upaya pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik eksternal maupun internal namun yang dominan adalah guru". Sedangkan Hartono Kasmadi (dalam Mimbar Pendidikan no. 1 Tahun 1990 : 13) mengatakan bahwa:

Apapun yang diperbaharui pada gilirannya faktor kemampuan gurulah yang banyak menentukan. Karena itu upaya mengembangkan kemampuan dosen (guru) melalui program berencana, baik yang formal maupun yang informal perlu memperoleh perhatian banyak.

Dari kedua penjelasan di atas kiranya tidaklah berlebihan dikatakan bahwa guru di sekolah dasar merupakan ujung tombak dalam mencapai misi sekolah dasar. Mengingat begitu dominannya faktor sumber daya manusia atau personel, khususnya guru di sekolah dasar, maka langkah yang tepat adalah meningkatkan atau mengembangkan kemampuan profesional guru tersebut. Kemampuan profesional yang dimaksud adalah kemampuan yang dituntut oleh suatu profesi yang dalam hal ini profesi guru untuk melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya. Ada beberapa hasil kajian yang pada intinya mengacu kepada pentingnya upaya pengembangan profesional ini, seperti yang dikemukakan oleh Fakry Gaffar (1987: 47), "Ijazah formal tidak ada artinya tanpa on the job training dan program pengembangan sumber daya manusia, agar menjadi tenaga yang benar-benar profesional".

Kemampuan profesional seorang guru diharapkan sesuai tugas-tugasnya, bukan saja mengajar akan tetapi lebih luas lagi yaitu melaksanakan administrasi sekolah sebagai jembatan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Engkoswara (1987 : 43) mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan sekolah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pembinaan sumber daya manusia, yang meliputi manusia, program pendidikan atau sumber belajar dan fasilitas.

Ketiga kegiatan di atas merupakan fungsi pokok administrasi pendidikan, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dan harus dilaksanakan, sebagai seorang guru.

Mengingat begitu strategisnya peranan guru dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dan begitu pentingnya upaya pengembangan guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas. Dengan adanya perhatian kepada diri guru, diharapkan pengelolaan proses belajar mengajar sebagai kunci pelaksanaan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Di samping itu, sosok guru yang mampu berperan sebagai tokoh yang terpercaya dapat dijadikan teladan dalam masyarakat.

Guru sebagai teladan dalam masyarakat, karena ia berperan sebagai sosok tubuh yang cukup ideal, berpendidikan khusus, berwibawa, berpengetahuan lebih dari pada masyarakat, berdedikasi pengabdian, dan mampu memberikan keteladanan (Achmad Sanusi, 1990: 20).

Dengan demikian, agar guru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab penuh dedikasi, dapat menyesuaikan diri dengan laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan arus informasi, dibutuhkan usaha instansi yang terkait untuk pengembangan profesionalnya.

Pengembangan profesional atau profesionalisasi tenaga pengajar atau guru harus merujuk kepada proses peningkatan kualitas kemampuan. Oteng Sutisna (1989 : 359)

mengemukakan profesionalisasi adalah suatu proses perubahan dalam status suatu pekerjaan dari yang non profesi atau semu profesi ke arah profesi yang sungguh. Jadi profesionalisasi merupakan suatu proses dinamis yang terus menerus berkembang ke arah pencapaian kriteria profesi yang ideal.

Ada pun ciri utama atau karakteristik suatu profesi berdasarkan hasil studi pengembangan model pendidikan profesional tenaga kependidikan adalah fungsi dan signifikansi sosial, keterampilan atau keahlian, pemerolehan keterampilan dengan menggunakan metode ilmiah, batang tubuh ilmu, masa pendidikan, aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional, kode etik, kebebasan untuk memberikan judgement tanggung jawab profesional dan otonomi, pengakuan dan imbalan yang layak (Achmad Sanusi, 1991: 20).

Pengembangan kemampuan profesional guru diperlukan dalam pendidikan, karena guru sebagai manusia pada hakikatnya memiliki potensi dan kebutuhan untuk mengembangkan dan merealisasikan dirinya. Dengan kemampuan profesional, diharapkan tujuan pendidikan di Sekolah Dasar dapat terlaksana secara efektif.

Fakry Gaffar, dkk. (1991) dalam makalah Globalisasi Terhadap Pemantapan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia dalam Bakajang Kedua menjelaskan, jika pendidikan dianggap sebagai suatu investasi nasional untuk masa depan bangsa, maka perlu ditangani secara profesional. Manajemen pendidikan sebagai alat untuk pencapaian tujuan pendidikan

nasional memerlukan dukungan teknologi dan pengelolaan secara profesional.

Untuk mewujudkan personil yang benar-benar mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi dalam masyarakat, Dinas P dan K Dati I Riau telah melakukan usaha pembinaan kemampuan profesional guru secara sistematis dan terprogram.

Demikian pula Pemerintah Daerah sebagai patner Dinas P dan K dalam membantu sekolah mencapai tujuan sekolah, telah memberikan bantuan, baik berupa pengadaan dana, dan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan pada lembaga-lembaga pendidikan khususnya pada Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan, dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Propinsi Riau. Untuk mewujudkan usaha di atas, salah satu usaha yang harus dilakukan oleh Dinas P dan K Dati I Riau adalah menjalin kerja sama dengan Universitas Riau yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1982.

Daerah Propinsi Riau memiliki khusus jika dibandingkan dengan Propinsi lain, wilayahnya meliputi sebagian umum dari pulau Sumatera bagian tengah yang dikenal sebagai Riau Daratan dan Riau Kepulauan yang terdiri dari 3.214 buah pulau besar dan kecil, membentang dari lereng timur pegunungan Bukit Barisan sampai laut Natuna.

Luas daratan Propinsi Riau adalah 94.561.61 km atau 9.456.161 hektar, dikelilingi perairan laut diukur sejauh batas teritorial 12 mil dari pulau-pulau yang letaknya paling luar, pada waktu air surut terendah seluas 35.306 km yang terdiri dari 17.501 km bagian perairan Selat Malaka dan 218.255 km perairan laut Natuna (laut Cina Selatan) sampai pantai Indragiri Hilir.

Secara georafis, Propinsi Riau terletak antara 1 derajat 05 lintang Selatan, 2 derajat 25 Lintang Utara 100 derajat 105 derajat 5 Bujur Timur Greenwich dan 6 derajat 51-1 derajat 45 Bujur Barat Jakarta, Batas-batas Propinsi Riau:
Sebelah Utara : Selat Singapura dan Selat Malaka,
Sebelah Selatan: Propinsi Jambi dan Selat Berhala,
sebelah Barat : Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Utara,
Sebelah Timur : Laut Cina Selatan dan Propinsi Kalimantan Barat (Panduan Wisata Riau, 1992 : 1-2).

Pemerintah Daerah Propinsi Riau sebagai organisasi yang mengatur pemerintah mulai dari tingkat Propinsi sampai ke tingkat Kecamatan memerlukan tenaga yang berkualitas sesuai dengan jenjang yang ditanganinya. Hal ini disadari oleh Dinas P dan K Dati I Riau, sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan oleh sebab itu ia berusaha membenahi diri untuk menghadapi tantangan kehidupan masa depan.

Sehubungan dengan ini, ada tiga hal yang terus diupayakan oleh Dinas P dan K dan Pemerintah Daerah setempat, diantaranya:

1. Pembinaan atau pengembangan terhadap guru-guru Sekolah Dasar yang berdomisili di daerah melalui jalur Perguruan Tinggi, Srata 1 Fakultas Institut dan Ilmu Keguruan dengan Jurusan Administrasi Pendidikan, yang diadakan secara rutin setiap tahun sejak tahun 1982.
2. Pembinaan terhadap Guru-guru Sekolah Dasar yang akan dicalonkan atau yang akan dipromosikan sebagai Kepala Sekolah mengikuti pelatihan jabatan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun sejak tahun 1986.
3. Pembinaan dan Pengembangan terhadap tenaga kependidikan yang ada di Propinsi Riau melalui Jenjang Pendidikan Program Pasca Sarjana yang berkerja sama dengan IKIP Bandung, dengan jurusan: Administrasi Pendidikan, Pendidikan Luar Sekolah, Kurikulum dan Bimbingan dan Penyuluhan.

Dengan adanya kebijakan dari Dinas P dan K Dati I Riau atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Dati I Riau bekerja sama dengan Universitas Riau dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang diutarakan di atas, dengan kegiatan pengembangan guru-guru SD yang terprogram tersebut, sehingga dapat memberikan sumbangan kepada lembaga untuk mencapai tujuannya.

B. Identifikasi Masalah.

Kalau diperhatikan beberapa permasalahan pokok di atas berkaitan erat dengan guru-guru tersebut, seperti masalah kualitas pendidikan, produktivitas pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian pengembangan profesional guru merupakan salah satu langkah yang strategis untuk mengatasi sebagian permasalahan sekolah dasar tersebut.

Disamping itu, ada alasan-alasan lain, mengapa pengembangan profesional guru begitu dituntut saat ini. Pertama, karena ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa berkembang pesat, sehingga kalau guru tidak meningkatkan kemampuannya dikhawatirkan guru tersebut akan ketinggalan, akibatnya materi yang disampaikan kepada murid sudah ketinggalan. Kedua diasumsikan suatu saat guru-guru tersebut akan dipromosikan kepada jabatan yang lebih tinggi misalkan menjadi Kepala sekolah, mengingat tugas yang akan dibebankan kepadanya adalah akan memimpin suatu unit kerja/organisasi dengan penuh tanggung jawab, maka untuk memangku jabatan tersebut penting sekali orang-orang yang berpendidikan dan berpengalaman. Ketiga agar personil mau bersemangat bekerja sehingga dapat memberikan sumbangan optimal kepada lembaga dalam mencapai tujuannya (lembaga).

Kalau diperhatikan dengan manajemen personel, yang salah satu fungsinya yaitu pengadaan (recruitment), maka dalam pengadaan personel, seharusnya dipersiapkan

sedemikian rupa sehingga dapat menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, fungsi manajemen personel lainnya yaitu fungsi pengembangan (development). Jadi personel yang sudah diadakan tadi perlu dikembangkan terus menerus. Kalau fungsi rekrutmen dan pengembangan tersebut tidak berjalan, maka akan menimbulkan masalah dalam organisasi, yang dalam istilah manajemen disebut *missmanagement*.

Sebagai salah satu usaha pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan Sekolah Dasar berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 1951, Khususnya dalam administrasi pembinaan personil, oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS.301/XI/1982, tanggal 11 Nopember 1982 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar/Izin Belajar Kepada Kepala Sekolah dan/Guru Sekolah Dasar Negeri Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Gubernur Daerah Tingkat I Riau Menimbang bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau perlu diadakan pembinaan terhadap Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar Negeri dengan memberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan pada lembaga-lembaga pendidikan. Pelaksanaannya secara rutin setiap tahunnya.

Maka pembiayaan Pendidikan tersebut melalui "*Proyek Peningkatan Kemampuan Tenaga Kependidikan*" (PPKTK),

APBD Tingkat I Riau. Penanggung jawab teknis adalah Kepala Dinas P dan K Dati I Riau.

Keterlibatan Universitas Riau adalah lembaga Pendidikan Tinggi sebagai wadah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan. Program ini diperkuat pula dengan menerbitkan Surat Perjanjian Ikatan Dinas dari Pemerintah Daerah Tingkat I Riau dengan Pihak Universitas Riau yang tertanggal 11-11-1982 No.Kpts.301/XI/1982 yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dan Kepala Dinas Dati I Riau serta Rektor Universitas Riau (UNRI).

Peserta Tugas Belajar Program S-1 bagi Guru SD yang dimaksud setiap tahunnya berjumlah lebih kurang 20 orang. Sejak tahun ajaran 1982-1983 sampai dengan tahun ajaran 1993-1994 telah diikuti oleh 214 orang peserta. Adapun mengenai keadaan guru SD yang telah menyelesaikan tugas belajar program studi Administrasi Pendidikan di UNRI, dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Keadaan guru SD yang telah selesai mengikuti
tugas belajar program studi Administrasi Pendidikan
di FKIP Universitas Riau
dari 1989-1990 sampai dengan 1993-1994

Kabupaten/Kodya	89 - 90	90 - 91	91 - 92	92 - 93	93 - 94	Jumlah
Kampar	4	7	6	3	5	25
Bengkalis	3	4	2	4	5	20
Indra Giri Hulu	3	7	3	2	6	21
Indra Giri Hilir	3	4	7	4	4	22
Kepulauan Riau	3	4	4	2	5	18
Batam	1	-	-	1	3	5
Pekan Baru	-	-	1	-	-	1
Jumlah	17	26	23	15	27	112

Sumber : Dinas P dan K Daerah Tingkat I Riau.

Tabel 1.2
Keadaan guru SD yang sedang mengikuti tugas
belajar program studi Administrasi Pendidikan
di FKIP Universitas Riau
dari 1989-1990 sampai dengan 1993-1994

Kabupaten/Kodya	89 - 90	90 - 91	91 - 92	92 - 93	93 - 94	Jumlah
Kampar	5	4	4	4	4	21
Bengkalis	4	4	3	4	4	19
Indra Giri Hulu	3	4	4	4	3	18
Indra Giri Hilir	2	5	4	5	4	20
Kepulauan Riau	4	3	4	3	3	17
Batam	2	-	2	-	2	6
Pekan Baru	-	1	-	-	-	1
Jumlah	20	21	21	20	20	102

Sumber : Dinas P dan K Daerah Tingkat I Riau.

Dari tahun 1982 sampai tahun 1993, Dinas P dan K sudah mengirimkan guru-guru SD ke Program S1 sebanyak 214 orang.

Waktu yang disediakan untuk pencapaian pendidikan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No: KPTS.287/VI/1988, jangka waktu pendidikannya bagi tugas belajar harus dapat menyelesaikan pendidikannya dalam batas waktu paling lama 5 tahun (sepuluh semester).

Sesuai dengan tujuan dan fungsi pokok jurusan administrasi pendidikan, maka para lulusannya diharapkan dapat memiliki seperangkat kompetensi.

Berkenaan dengan Kurikulum, tujuan dan fungsi yang sudah diperoleh peserta tugas belajar selama di dalam pendidikan Program S-1 Jurusan administrasi Pendidikan sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka di dalam melaksanakan tugas yakni: kemampuan melaksanakan perencanaan, kemampuan dalam pelaksanaan, dan kemampuan mengevaluasi.

Dari hasil wawancara dari observasi peneliti yang dilaksanakan pada bulan September 1993, maka kontribusi dari Program S-1 terhadap tugas di lapangan tampak bervariasi, diantara mereka kurang mendapat peluang dari kepala sekolah untuk melaksanakan tugas administrasi sekolah. Hal ini dapat mengurangi kemauan diri guru untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Umumnya guru SD adalah guru kelas atau guru borongan, kurang fasilitas sekolah. Hal ini menyebabkan kepala sekolah

lebih banyak menitik beratkan kegiatan pendidikan pada pembenahan fisik sekolah. Tetapi ada diantaranya yang dapat melaksanakan tugasnya secara baik.

Berdasarkan pemikiran itulah penulis terdorong untuk meneliti kemampuan guru-guru Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas yang telah menyelesaikan tugas belajar, baik dalam proses belajar mengajar dan juga di dalam pelaksanaan administrasi sekolah sebagai hasil dari upaya Pemerintah Daerah Tingkat I Riau dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Propinsi Dati I Riau melalui Program Studi Administrasi Pendidikan secara khusus pada FKIP UNRI atas dasar kerja sama dengan Dinas P dan K Dati I Riau.

C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian.

Setelah memperhatikan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Sejauh mana kemampuan guru-guru SD melaksanakan tugasnya bagi yang telah mengikuti tugas belajar program S-1 sebagai administrator pada Sekolah Dasar di lingkungan Dinas P dan K Dati I Riau.

Dari rumusan masalah yang masih bersifat umum tersebut menyangkut beberapa permasalahan, yang penulis jabarkan dalam beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah setelah mengikuti pendidikan Program S-1, para

guru (lulusan) dapat melaksanakan tugas/pekerjaannya mengenai pengelolaan proses belajar (administrasi kelas).

2. Apakah setelah mengikuti pendidikan Program S-1 para guru (lulusan) dapat memberikan bantuan kepada kepala sekolah dalam hal administrasi sekolah.
3. Apakah setelah mengikuti pendidikan Program S-1, para guru (lulusan) merasa termotivasi untuk lebih berprestasi di lingkungan sekolahnya.
4. Apakah ada manfaat tugas belajar mengikuti Program S-1, dengan pembinaan dan rencana pengembangan karir masing-masing guru (lulusan) Program S-1.
5. Apakah setelah mengikuti pendidikan di Program S-1, para guru (lulusan) merasa memperoleh ilmu pengetahuan.
6. Faktor lain, apakah yang berpengaruh dalam melaksanakan tugas.

D. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

- a. Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah kembali tentang penempatan para guru (lulusan) Program S-1, sehingga dapat dicari alternatif untuk mewujudkan iklim kerja yang produktif baik bagi individu maupun

untuk lingkungan kerja (Dinas P dan K Dati I Propinsi Riau), selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif bagi penyempurnaan atau pengelolaan terhadap lulusan Program S-1 bagi guru guru SD dilingkungan Dinas P dan K Dati I Propinsi Riau yang bekerja sama dengan Universitas Riau dan penanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Riau.

2. Tujuan Khusus

Bertitik tolak dari tujuan umum di atas, maka tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis tugas/ pekerjaan mengenai pengelolaan proses belajar mengajar atau administrasi kelas.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan membantu kepala sekolah dalam melaksanakan administrasi sekolah.
- c. Mendeskripsi dan menganalisis motivasi para guru (lulusan) Program S-1 untuk lebih berprestasi ditempat tugasnya.
- d. Mendeskripsi dan menganalisis mafaat mengikuti tugas belajar pada Program S-1 dengan pembinaan pengembangan karir.
- e. Mendeskripsi dan menganalisis persepsi para guru memperoleh ilmu pengetahuan.
- f. Mendeskripsi dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas.

E. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini dilihat dari dua segi yaitu segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teoritis

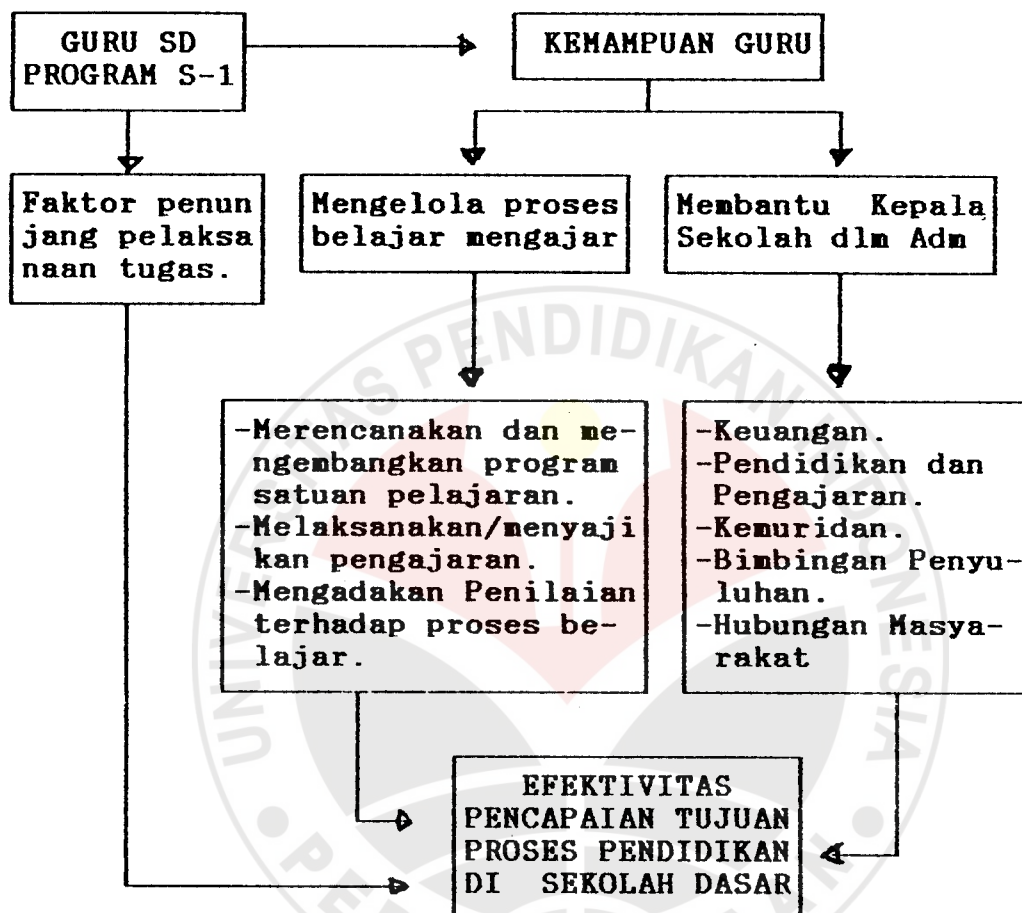
Dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis kemampuan guru-guru Sekolah Dasar Negeri yang telah menyelesaikan tugas belajar program S1. Baik ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi merupakan suatu proses administrasi pendidikan dan keharusan penggunaannya dalam pengelolaan pendidikan. Dengan demikian penelitian ini merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan dalam administrasi program pengajaran.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini, pertama sebagai masukan dan sumbangan terhadap Guru-guru dalam penyempurnaan dan perbaikan pengelolaan pendidikan, serta menjadi pegangan dan petunjuk dalam mengelola administrasi program pengajaran. Yang kedua adalah sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Tingkat I Riau, khususnya Dinas P dan K Dati I Riau sebagai penanggung jawab teknis pengelolaan guru-guru SD untuk penyempurnaan pelaksanaan dan peningkatan Tugas Belajar Program S1 bagi guru-guru Sekolah Dasar di Propinsi Riau untuk masa yang akan datang.

F. Kerangka Penelitian

Dari permasalahan yang diuraikan di atas dapat dibuat suatu paradigma atau kerangka penelitian seperti berikut :



Gambar 3 : Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian tersebut merupakan jalan pikiran yang ditempuh dalam penelitian berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Kerangka ini menunjukkan: *Pertama* kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar merupakan hal yang sangat penting, karena

guru merupakan ujung tombak terlaksananya proses belajar mengajar. *Kedua* kemampuan guru membantu kepala sekolah dalam melaksanakan administrasi sekolah, dalam hal ini administrasi sekolah atau administrasi pengajaran merupakan jembatan untuk tercapainya proses belajar mengajar yang efektif. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas.



